

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pariwisata yaitu salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional.

Sektor ini diandalkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup pandal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi.

Untuk mengembangkan sektor ini pemerintahan berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung arah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan objek-objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi wisata baik itu wisata alam ataupun buatan yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut, salah satunya adalah Jawa Barat yang memiliki banyak daya tarik wisata khususnyawisata alam yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Pariwisata mengalami kemajuan karena berkembangnya ekonomi komunikasi dan transportasi. Perkembangan para wisatawan melalui teknologi komunikasi seperti melalui media

sosial bisa membuat objek pariwisata yang biasa saja menjadi objek pariwisata yang sangat luar biasa.

Perkembangannya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial, dan budaya namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat.

Beberapa tempat-tempat wisata tersebut berada di bawah koordinasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Sektor kepariwisataan di Kabupaten Bandung Barat memegang peranan penting sebagai pusat pengembangan, dan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan kegiatan usaha dan kepariwisataan di daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Maka berdasarkan data tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian terhadap Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang tersebut.

Namun pada kenyataannya masih ditemukan hal-hal yang dapat diartikan bahwa belum adanya koordinasi yang baik oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat dengan instansi terkait maupun masyarakat. Hal-hal tersebut diantaranya adalah :

1. Adanya beberapa jalan menuju kawasan wisata yang terbengkalai yang mengurangi rasa nyaman bahkan membahayakan bagi wisatawan maupun masyarakat.
2. Kurangnya alat transportasi seperti angkutan orang di kawasan wisata, sehingga bagi wisatawan yang

tidak menggunakan kendaraan pribadi akan kesulitan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata.

3. Belum banyak Objek Wisata yang menyediakan fasilitas parkir untuk kendaraan sehingga, kendaraan wisatawan parkir di jalan protokol. Mengganggu Kelancaran arus lalu lintas . dan menyebabkan kemacetan.

Dari

beberapa faktor tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai faktor utama selain pihak swasta dan masyarakat dinilai kurang optimal dalam melaksanakan tugas pekerjaannya untuk membangun pariwisata daerah..

Tentunya bila dibiarkan tanpa ada pemecahan ini bertentangan dengan apa yang diharapkan pemerintah guna mengembangkan industri pariwisata daerah berdaya saing.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri termasuk mengurus masalah kepariwisataan . Objek Wisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan apabila dalam pengelolaannya oleh pemerintah daerah dilakukan secara maksimal, dengan mempertimbangkan faktor alam dan lingkungannya.

Selanjutnya agar potensi pariwisata dapat berkembang secara optimal diharapkan menjadi daya tarik bagi para investor di bidang pariwisata untuk berinvestasi dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki berbagai macam Objek Pariwisata berpotensi untuk dikembangkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kepariwisata Daerah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai – nilai agama, budaya, kekayaan alam, peninggalan purbakala dan peninggalan sejarah, seni, karakteristik daerah dan kelestarian alam yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan.

Berdasarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pasal 3 dimaksudkan untuk :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. Pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas;

b. PembinaanpelaksanaantugasDinas

(3) KepalaDinasmempunyaiairinciantugassebagaiberikut :

- a. Mengkoordinasikanperumusan dan menetapkanRencanaStrategis, program kerja, pedomanpelayan anumum, kebijakanteknis, LAKIP, LKPI dan LPPD Dinas;
- b. Mengkoordinasikanpelaksanaankebijakanteknis dan pelayan anumum di bidangkepariwisataan, promosi dan ekonomikreatif, dan kebudayaan;
- c. Merumuskanrencanapembangunan di bidangkepariwisataan, promosi dan ekonomikreatif, dan kebudayaan;
- d. Memfasilitasipenyelenggaraan program, kesekretariatan, kepariwisataan, promosi dan ekonomikreatif, dan kebudayaan, UPT, Jabatanfungsional;
- e. Menyampaikanlaporan, saran pertimbangan dan rekomendasikepadaBupatisebagaibahanpenetapankebijakanPemerintah Daerah di bidangkepariwisataan, promosi dan ekonomikreatif, dan kebudayaan;
- f. Melaksanakankoordinasi dan kerjasamadenganinstansi dan/ataulembagaterkaitlainnyauntukkelancaranpelaksanaankegiatanDinas;
- g. Merumuskantelaahanstafsebagaibahanpertimbanganpengambilankebijakan;dan
- h. Menyelenggarakan tugas lain sesuaidengantugas dan fungsinya.

Denganadanyakoordinasi yang efektifantaraDinasPariwisata dan KebudayaanUntukmencapaikeberhasilandalampengelolaanObjekWisata Wilayah KecamatanLembangperluadanyaKoordinasiantarapihak-pihak yang terkait.

Menurut Djamil dalam Hasibuan (2014:86)

Koordinasi sebagai suatu usaha kerjasama antara badan, instansi unit dalam pelaksanaannya tertentu, sehingga dapat saling membantu, dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelesaikan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Daya tarik wisata di Wilayah Kecamatan Lembang banyak pengguna media sosial yang mengunggah foto dengan berlatarkan keindahan wisata sesuai dengan tempatnya.

Pengelolaan Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang pada saat ini memerlukan repitalisasi yang maksimal dikarenakan belum tertatanya sarana dan prasarana lainnya.

Sehubungan hal tersebut, kondisi Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang belum tertata dan dikelola secara baik. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

**Table 1.1**

Kondisi Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang :

No	Tempat wisata	Kondisi saat ini
1	De' ranch	Banyak sampah
2	The Lodge Maribaya	Jalan menuju lokasi sangat jauh
3	Floating Market	Menimbulkan kemacetan
4	Farmhouse	Menimbulkan kemacetan
5	The Great Asia Afrika	Menimbulkan kemacetan
6	Lembah Bougenville	Kurangnya Penerangan Jalan

7	GunungTangkubanParahu	BerpotensiLongsor
8	GrafikaCikole	Jalananlicin
9	Didieu Land	BerpotensiLongsor
10	Kebun Begonia	TempatSempit
11	Orchid Forest	Aksesmasuktempatwisatalicin
12	ObservatoriumBoscha	Banyaknyasiswauntukpenelitian
13	SAPU LIDI	Kurangnyalahanparkir
14	Maribaya	Jalan menujulokasisangatjauh
15	Trizara Resort	Akses Jalan MenujulokasiRusak
16	Pine Foret Camp	Lampukurang
17	WisataPunclut	Tempatmakantidaktertatadenganbaik
18	Lembang Wonderland	Tempatnya Kurang Luas
19	CibodasArgowisata	Kurang Bersih
20	ImahSeniman	Rawan Longsor

Sumber : *Hasil Observasi, 2020*

Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan bahwa dari 20 tempat wisata di Kecamatan Lembang melihat dari segi kondisinya belum mencapai koordinasi yang optimal sesuai dengan standar operasional, untuk penyelenggaraan objek wisata.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti disebutkan beberapa indikator belum optimalnya koordinasi pengelolaan objek wisata Wilayah Kecamatan sebagai berikut ;

1. Belum tersedianya pengaturan aliran informasi yang jelas dan tidak mudah diakses oleh institusi terkait mengenai Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang.
2. Rendahnya sinkronisasi aparat setempat dengan dinas pariwisata terhadap pengelolaan Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang.
3. Belum adanya kompetensi partisipan yang berwenang yang terlibat dan mengawasialannya koordinasi Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang.
4. Belum adanya kegiatan yang terkoordinir untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana Objek Wisata di wilayah Kecamatan Lembang.

Masalah tersebut peneliti hubungkan dengan salah satu teori sebagai pendekatan dalam penelitian yaitu koordinasi karena konsep koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen dalam memecahkan suatu permasalahan khususnya masalah – masalah pemerintahan, sehingga dalam pengelolaan objek wisata di wilayah kecamatan Lembang diharapkan dapat berjalan optimal dan peneliti tertarik menuangkan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ Koordinasi Pengelolaan Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang” .

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah mengkaji mengenai Koordinasi Pengelolaan Objek Wisata Wilayah Kecamatan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang, penyelenggaraan Kepariwisata Daerah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan

Daerah Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Koordinasi Pengelolaan Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang?
2. Apakah Faktor pendukung dan penghambat Koordinasi Pengelolaan Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang?
3. Apakah Upaya yang dilakukan dalam Koordinasi Pengelolaan Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang?

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis Koordinasi Pengelolaan Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

1. Untuk mengetahui dan bagaimana Koordinasi Pengelolaan Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis factor pendukung dan penghambat Koordinasi Pengelolaan Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya Koordinasi Pengelolaan Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang.

### **1.5 Kegunaan Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian ilmiah khususnya dalam disiplin ilmu pemerintahan dan dalam manajemen pemerintahan, kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya Ilmu Pemerintahan dan dalam kajian Manajemen Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti, yang khususnya meneliti daya tarik yang sama serta menambah wawasan dan ilmu pembaca yang membacanya tentang Koordinasi Pengelolaan Objek Wisata Wilayah Kecamatan Lembang.